

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian ini, penulis telah mereview beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel-variabel dibahas oleh peneliti yaitu, LDAR, DER, dan Manajemen Laba. Adapun untuk review penelitian adalah sebagai berikut:

Nisa et al., (2018) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Sampel yang digunakan sebanyak 63 data meliputi 21 perusahaan manufaktur dalam 3 tahun. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, uji autokolerasi), analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis (uji t) dan uji koefisien determinasi R². Variabel bebas *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin* dan Manajemen Laba serta variabel terikat meliputi pembiayaan pajak penghasilan badan terutang. Hasil uji t pada model regresi, menunjukkan variabel *Gross Profit Margin* berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif, sementara untuk *Net Profit Margin* tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif, dan untuk Manajemen Laba berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Laksono (2019) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal (*Leverge, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Asset Ratio*), Profitabilitas, & Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar BEI Tahun 2015 – 2017. Jenis penelitian kuantitatif, dari total populasi sebanyak 144 perusahaan berhasil ditarik sebanyak 42 sampel berdasarkan metode *purposive sampling* dimana peneliti menerapkan beberapa kriteria. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel struktur modal (*Leverage, Debt to Equity Ratio*), biaya operasional, dan profitabilitas berpengaruh, akan

tetapi variabel struktur modal (*Long Term Debt to Asset Ratio*) menyatakan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Widyaningsih & Horri (2019) meneliti tentang pengaruh Manajemen Laba, *Debt to Equity Ratio*, dan *Return On Asset* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi Kasus pada Perusahaan yang terdaftar dalam BEI Sektor Real Estate dan Properti Tahun 2015 – 2016. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan populasi dari penelitian ini adalah 51 perusahaan real estate dan properti. Proses pengambilan sampel digunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Variabel bebas Manajemen Laba, *Debt to Equity Ratio*, *Return On Asset*, dan Variabel terikat Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil uji t menyatakan bahwa Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan, sedangkan *Debt to Equity Ratio* dan *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Simamora & Mahardika (2015) melakukan penelitian Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang terdaftar di BEI Periode 2010 – 2013. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yaitu uji T, uji F dan uji koefisien determinasi. Variabel bebas terdiri dari *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* serta Variabel terikat yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* secara parsial dan bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Sucipto & Hasibuan (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 14

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh negatif signifikan dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Mulyadi & Anwar (2015), *Global Conference on Contemporary Issues in Education, GLOBE-EDU 2014, 12-14 July 2014, Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management*. Peneliti menggunakan *discretionary accrual* untuk mengukur manajemen laba, dan tarif pajak efektif sebagai ukuran manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari *corporate governance* terhadap manajemen laba dan manajemen pajak. Untuk pengujian pertama menggunakan *GAAP ETR*, peneliti menemukan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak sebesar 1%, hanya kompensasi dewan dan nilai perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (kompensasi dewan signifikan pada 5%, dan nilai perusahaan signifikan dalam 1%). Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa bagian tata kelola perusahaan secara signifikan mempengaruhi manajemen pajak dan manajemen laba. Kompensasi dewan dan dewan independen secara konsisten (baik dalam *GAAP ETR* dan *Current ETR*) menunjukkan korelasi negatif terhadap manajemen pajak. Sedangkan untuk jumlah pengurus ditemukan korelasi positif terhadap manajemen perpajakan dengan menggunakan *Current ETR*.

Basit & Irwan (2017), *International Journal of Accounting & Business Management Vol. 5 (No. 2), November, 2017, The Impact of Capital Structure on Firms Performance: Evidence from Malaysian Industrial Sector – A Case Based Approach*. Statistik deskriptif dan regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Dalam memilih 50 perusahaan produk industri yang terdaftar di bursa utama Bursa Malaysia berdasarkan laporan tahun 2011 - 2015 digunakan *teknik convenience sampling*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio*, *Total Debt Ratio*, dan *Total Equity Ratio*. Sementara variabel terikat adalah *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *Earning Per Share (EPS)*. Hasil regresi ditemukan *Debt to Equity* berpengaruh negatif, *Total Debt Ratio* dan *Total Equity Ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. *Debt to Equity* berpengaruh negatif, *Total Debt*

Ratio berpengaruh positif dan *Total Equity Ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Terakhir, *Debt to Equity* berpengaruh signifikan negatif, *Total Debt Ratio* berpengaruh signifikan positif, dan *Total Debt Ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap EPS.

Yorke et al., (2016), *International Journal Management Practice*, Vol. 9, (No. 2) 2016, *The Effects of Earning Management and Corporate Tax Avoidance on Firm Value*. Penelitian ini menganalisis implikasi dari manajemen laba dan penghindaran pajak pada nilai perusahaan. Menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana selama sepuluh tahun (2003 – 2012), studi ini berfokus pada dua masalah terkait: pertama, menganalisis hubungan antara manajemen laba (*Earning Management*) dan penghindaran pajak perusahaan (*Corporate Tax Avoidance*). Kedua, menguji pengaruh interaksi antara dua variabel terhadap nilai perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa banyak aktivitas EM di perusahaan sampel dan dalam hal ini manajer menggunakan teknik penghindaran untuk mengelola laba. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa, meskipun terdapat pengaruh positif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, pengaruhnya tidak signifikan untuk mengimbangi dampak negatif dari manajemen laba, sehingga menghasilkan pengaruh negatif secara keseluruhan terhadap nilai perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Menurut Fahmi (2017), yang dimaksud struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*long term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan.

Sudana (2015) menyatakan struktur modal (*capital struktur*) berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan

perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Sedangkan menurut Musthafa (2017), struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Struktur modal adalah perbandingan modal asing atau jumlah utang dengan modal sendiri. Kebijakan struktur modal merupakan pemeliharaan antara resiko dan pengembalian yang diharapkan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan struktur modal adalah perimbangan antara jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dan modal sendiri yang berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang perusahaan.

2.2.2 Komponen Struktur Modal

Warsono (2012) menyatakan bahwa struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hutang Jangka Panjang (*Long Term Debt*)

Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat – surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).

2. Modal Sendiri (*Equity*)

Modal sendiri atau ekuisitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Model sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbataas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada 2(dua) sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

a. Modal Saham Preferen

Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

b. Modal Saham Biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang – kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan aset telah dipenuhi.

2.2.3 Teori – Teori Struktur Modal

Menurut Sudana (2015), teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan dan harga pasar saham perusahaan. Jika kebijakan pembelanjaan perusahaan dapat mempengaruhi ketiga faktor tersebut, bagaimana kondisi utang jangka panjang dan modal sendiri yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal perusahaan atau memaksimalkan harga pasar saham perusahaan. Harga pasar saham perusahaan mencerminkan nilai perusahaan, dengan demikian jika nilai suatu perusahaan meningkat, maka harga pasar saham perusahaan tersebut juga akan naik.

2.2.3.1 Teori Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan jika Tidak Ada Pajak dan Biaya Kebangkrutan

Menurut Sudana (2015) permasalahan yang dijelaskan dalam teori struktur modal ini adalah bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal perusahaan dan harga pasar saham. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu dipahami asumsi – asumsi yang terkait dengan teori struktur modal, yaitu :

1. Tidak ada pajak dan biaya kebangkrutan.

2. Rasio utang terhadap modal diubah dengan jalan perusahaan mengeluarkan saham untuk melunasi utang atau perusahaan meminjam untuk membeli kembali saham yang beredar.
3. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar seluruh pendapatan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
4. Nilai harapan distribusi probabilitas subjektif pendapatan operasi setiap perusahaan di masa yang akan datang sama bagi semua investor.
5. Pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan.

Adapun pendekatan struktur modal perusahaan yang dapat digunakan adalah seagai berikut:

1. Pendekatan Laba Bersih (*Net Income Approach*)

Berdasarkan pendekatan laba bersih, semakin banyak utang jangka panjang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat dan biaya modal perusahaan akan menurun. Dengan demikian struktur modal optimal akan tercapai jika perusahaan menggunakan utang secara maksimal.

2. Pendekatan Laba Bersih Operasi (*Net Operating Income Approach*)

Berdasarkan pendekatan laba bersih operasi, berapapun jumlah utang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan, nilai perusahaan tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian harga saham perusahaan pun tidak berubah.

3. Pendekatan Tradisional (*Traditional Approach*)

Pendekatan tradisional mengemukakan struktur modal optimal perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaannya dengan menggunakan jumlah utang (*Leverage*) tertentu. Dengan menggunakan utang yang semakin besar, pada mulanya dapat menurunkan biaya perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan.

4. Modigliani-Miller Position

Modigliani dan Miller (MM) mendukung hubungan antara struktur modal dan biaya modal sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan pendekatan laba bersih operasi, yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dan secara tidak langsung MM tidak setuju dengan pendekatan

tradisional yang mengatakan struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada jumlah utang tertentu. Untuk mendukung pendapatnya, MM mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Pasar modal sempurna.
- b. *Expend value* dari distribusi probabilitas bagi semua investor sama.
- c. Perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas resiko yang sama.
- d. Tidak ada pajak pendapatan perusahaan.

MM berpendapat nilai perusahaan tidak bergantung pada struktur modalnya, jika terdapat dua perusahaan yang memiliki kesamaan dalam segala aspek kecuali struktur modalnya, maka perusahaan tersebut harus mempunyai nilai total yang sama. Dengan kata lain, manajer keuangan tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan merubah proporsi utang dan ekuitas yang digunakan membiayai perusahaan.

2.2.3.2 Teori Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan jika Ada Pajak dan Biaya Kebangkrutan

Menurut Sudana (2015) teori pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan jika ada pajak dan biaya kebangkrutan adalah sebagai berikut :

1. *Signaling Theory*

Berbeda dengan *trade-off theory* yang menyatakan keputusan perusahaan menggunakan utang didasarkan pada keseimbangan antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan. *Signaling theory* menyatakan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung untuk meningkatkan jumlah utangnya, karena tambahan pembayaran bunga akan diimbangi dengan laba sebelum pajak.

2. *Pecking-order Theory*

Selain itu *Pecking-order Theory* menggambarkan sebuah hierarki dalam pencarian dana perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan *internal equity* dalam membiayai investasi dan mengimplementasikannya sebagai peluang pertumbuhan. Dalam *Pecking order Theory* dinyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal, hutang yang aman dibandingkan hutang yang berisiko dan *convertible securities* serta yang terakhir saham biasa.

3. *Modigliani-Miller Position* (apabila ada pajak)

MM berpendapat apabila dalam keadaan ada pajak penggunaan utang akan selalu lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri. Hal ini disebabkan oleh sifat *tax deductibility on interest payment* atau pembayaran struktur modal yang terbaik adalah struktur modal yang menggunakan utang sebanyak-banyaknya.

4. *Trade Off Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa hutang tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga ada pengorbanan biayanya. Dengan teori ini manajemen akan memikirkan dan mempertimbangkan antara penghematan pajak dan resiko kebangkrutan dalam penentuan struktur modal, *Trade-off theory* juga menjelaskan bahwa jika posisi struktur modal dibawah titik optimal maka setiap penambahan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.2.4 Faktor Penentu Struktur Modal

Menurut Sartono (2010) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan manajer mengenai struktur modal antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat Penjualan

Perusahaan dengan penjualan relatif stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan tidak stabil.

2. Struktur Aset (*Asset Tangibility*)

Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan utang dalam jumlah besar, hal ini disebabkan karena banyaknya aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

3. Tingkat Pertumbuhan (*Growth Opportunity*)

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai dividen tetapi lebih baik digunakan untuk pembiayaan investasi.

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan berinvestasi menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan lebih menggunakan laba ditahan dibanding dengan utang. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

5. Pajak

Bunga utang dapat mengurangi pajak yang dibayar perusahaan, semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar keuntungan dari penggunaan utang. Jadi, perlindungan pajak ini menjadi pertimbangan dalam penggunaan utang.

6. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal dari pasar modal dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan dalam ukuran perusahaan yang lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ketika kemungkinan kegagalan bagi perusahaan kecil maka investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

7. Kondisi Intern Perusahaan dan Ekonomi Mikro

Perusahaan perlu menanti saat yang tepat untuk menjual obligasi dan saham. Kondisi yang paling tepat saat menjual obligasi atau saham pada tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang *bullish*.

2.2.5 Rasio Manajemen Utang

Rasio Utang (*Leverage*) dipergunakan berkaitan dengan pengukuran rentabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang –

utanganya. Besarnya jumlah utang yang terdapat pada neraca menunjukkan berapa besar modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam operasinya.

Terdapat dua alasan dibalik dampak *leverage*. Pertama, karena bunga dapat menjadi pengurang pajak, pengguna utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar bagi investor. Kedua, jika laba operasi sebagai *presentase* terhadap aset melebihi tingkat bunga atas utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan dapat menggunakan utang untuk membeli aset, membayar bunga atas utang, dan masih mendapatkan sisanya sebagai bonus bagi pemegang saham. Berdasarkan laporan keuangan maka perhitungan rasio utang (pemeriksaan neraca untuk menentukan proporsi dana yang diwakili oleh utang) sebagai berikut adalah :

2.2.5.1 Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna mengetahui *financial leverage* perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula utang yang digunakan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Untuk pengukuran *presentase* dana dapat dilakukan dengan membagi utang jangka panjang dengan ekuitas perusahaan.

2.2.5.2 Long Term Debt to Ratio (LDAR)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan sejumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki.

2.2.6 Manajemen Laba

2.2.6.1 Pengertian Manajemen Laba

Hidayat (2016) mendefinisikan manajemen laba adalah intervensi yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen dalam proses penentuan laba, dan biasanya dilakukan untuk tujuan pribadi. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam laporan keuangan suatu perusahaan dan

penyusunan transaksi. Untuk mengubah laporan keuangan dan mereka mengharapkan manfaat dari tindakan tersebut. Perbuatan ini dikategorikan sebagai kecurangan karena secara sadar dilakukan manajer perusahaan agar *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi ekonomi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu.

Menurut Sulistiyanto (2008) secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi – informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

Menurut Healey and Wahlen (1999) manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka – angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Menurut Scott (2015), manajemen laba adalah pilihan manajemen terhadap kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba guna mencapai beberapa tujuan laba yang akan dilaporkan.

2.2.6.2 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistiawan (2011), secara umum terdapat beberapa hal yang memotivasi individu maupun badan usaha untuk melakukan tindakan *Creative Accounting* atau manajemen laba, yaitu :

1. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manajer

dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajer salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.

2. Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul.

3. Motivasi Pajak

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan yang belum *go public* cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah – olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4. Motivasi *Initial Public Offering* (IPO)

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial*

Public Offering (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitupun dengan perusahaan yang sudah *go public* untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

5. Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sektear periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya.

6. Motivasi Politis

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan – perusahaan strategis semisal perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan – perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa motivasi uang mendorong terjadinya manajemen laba, namun yang sejalan dengan penelitian ini yaitu ditinjau dari motivasi perpajakan (*Taxation Motivation*). Scott (2015) mengemukakan bahwa motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Intinya manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

2.2.6.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2015) ada empat pola manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yaitu :

1. *Taking a Bath*

Manajemen laba dengan pola *taking a bath* biasanya dilakukan ketika perusahaan melakukan reorganisasi termasuk saat pergantian *CEO*. *Taking a bath* dilakukan dengan melaporkan rugi yang besar pada periode sekarang.

2. *Income Minimization*

Income Minimization adalah pola manajemen laba yang serupa dengan *taking a bath* namun dalam bentuk yang tidak terlalu ekstrim. *Income minimization* dilakukan dengan memilih kebijakan yang dapat meminimalkan laba seperti penghapusan beberapa aset dan *intangible asset*, beban pemasaran, dan beban R&D.

3. *Income Maximization*

Manajer melakukan *income maximization* dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan agar bisa mencapai *bogey* dalam skema bonus. Namun *income maximization* yang dilakukam akan berhenti ketika sudah mencapai *cap* yang ada dalam skema bonus.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing mungkin adalah pola yang paling menarik dalam manajemen laba. Manajer akan melakukan *income smoothing* diantara *bogey* dan *cap*. Skema bonus memberikan insentif bagi manajemen untuk mempertahankan laba diantara *bogey* dan *cap*.

2.2.6.4 Teknik Manajemen Laba

Manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Perubahan metode akuntansi

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda misalnya :

- a. Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*stright line*).
- b. Mengubah periode depresiasi.

2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi, misalnya :

- a. Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih
- b. Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi
- c. Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.

Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut keputusan operasional, misalnya :

- a. Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
- b. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya
- c. Kerjasama dengan *vendor* untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya
- d. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
- e. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai

2.2.6.5 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang digunakan dalam manajemen laba adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Teori keagenan digunakan sebagai pemisah antara pengelola perusahaan (pihak manajemen) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham) (Husnan dan Eny, 2015). Antara pemegang saham dan manajemen memiliki tujuan yang berbeda sehingga memunculkan konflik kepentingan. Seorang pemegang saham menginginkan agar pengembalian yang diberikan atas hasil investasi dilakukan secara cepat dan keuntungan yang tinggi, sedangkan seorang manajer menginginkan insentif / kompensasi sebesar – besarnya atas kinerjanya dalam mengelola perusahaan.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

2.2.6.6 Teknik Pendeteksian Manajemen Laba

Pada penelitian ini, manajemen laba dideteksi dengan menggunakan *discretionary accrual* yang diukur menggunakan model yang dikembangkan oleh Friedlan (1994). Secara umum penelitian tentang manajemen laba menggunakan pengukuran berbasis akrual dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan *total accrual* adalah pendekatan tersebut berpotensi untuk mengungkapkan cara – cara untuk menurunkan atau menaikkan laba, karena cara – cara tersebut kurang mendapat perhatian untuk diketahui pihak luar. *Total accrual* dalam perhitungan laba terdiri atas *non discretionary* dan *discretionary accrual*, *non discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang terjadi secara alami atau wajar seiring dengan perubahan aktivitas perusahaan. Sedangkan *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang berasal dari rekayasa manajemen (*earnings management*).

Didalam melakukan pendeteksian adanya manipulasi laba, pada umumnya akan ditemukan dua jenis *disrectionary accruals*, yaitu *disrectionary accruals* negatif dan positif. *Disrectionary accruals* positif mencerminkan manipulasi yang dilakukan manajer dengan pola *income increasing*, sedangkan negatif akan menunjukkan manipulasi *income decreasing*, bentuk – bentuk *discretionary accruals* tersebut disesuaikan dengan motivasi yang dilakukan oleh manajer.

2.2.7 Pajak Penghasilan Badan

2.2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2014) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. PPh badan adalah pajak penghasilan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD; dan
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan pembentukannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Pajak Penghasilan Badan Terutang yang tertuang dalam undang – undang pasal 2 (1) mewajibkan untuk membayar pajak dari setiap penghasilan yang diperoleh baik dalam negeri ataupun luar negeri, salah satunya yang menjadi subjek pajak adalah badan usaha.

2.2.7.2 Tarif Wajib Pajak Badan

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai pasal 17 ayat (1b) UU PPh, tarif sesuai pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai pasal 31E UU PPh.

1. Tarif Pasal 17 Ayat (1b) UU PPh

Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.

2. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh

Bagi WP Badan berbentuk perseroan terbuka (Tbk atau *go public*), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010, tarif untuk WP Badan yang sudah *go public* adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah *go public* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- b. Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan.
- c. Masing – masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Kondisi yang disebutkan pada kedua poin terakhir tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut diatas tidak terpenuhi, maka WP Badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3. Tarif Pasal 31E UU PPh

Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat

(2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010).

WP Badan yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 miliar. Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010, yang dimaksud dengan “Peredaran Bruto” adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sebelum dikurangi dengan biaya fiskal.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 *Long Term Debt to Asset Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Long Term Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aktiva perusahaan didanai oleh hutang jangka panjang. Terdapat dua sumber dana yang berasal dari hutang untuk aktiva, yaitu dari investor dan kreditor. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada investor dan kreditor. Peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh sebab itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Seperti dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, menyatakan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha dalam hal ini biaya bunga, dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksono (2019), menunjukkan hasil bahwa variabel struktur modal (*long term debt to asset ratio*) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamora & Mahardika (2015) dan Sucipto & Hasibuan (2020) yang menunjukkan bahwa LDAR (*Long Term Debt to Asset Ratio*) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2.3.2 Debt to Equity Ratio terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Debt to Equity Ratio adalah salah satu rasio yang digunakan untuk menilai hutang dan ekuitas. Rasio ini membandingkan antara seluruh utang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran dividen, bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang biaya (*tax deductible*) sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sedangkan pengeluaran dividen tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*non-tax deductible*) sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh. Pendanaan yang dominan berasal dari hutang akan menimbulkan biaya berupa bunga hutang yang tinggi, hal ini akan berdampak pula pada besaran pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Laksono (2019), Widyaningsih & Horri (2019), Simamora & Mahardika (2015), Sucipto & Hasibuan (2020) tentang pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukkan hasil bahwa DER (*Debt to Equity Ratio*) memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2.3.3 Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Manajemen laba adalah upaya untuk merekayasa, menyembunyikan, serta mengubah angka – angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak. Berbagai metode akuntansi digunakan oleh pihak manajemen dalam rangka penghematan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nisa et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa Manajemen Laba berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih & Horri (2019) tentang Pengaruh Manajemen Laba, *Debt To Equity Ratio*, dan *Return On Asset* terhadap PPh Badan Terutang, yang menunjukkan hasil bahwa variabel

manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PPh Badan Terutang sehingga hipotesis ditolak.

2.4 Pengembalian Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis kemudian dapat diuji kebenarannya melalui penganalisan dan penelitian hipotesis tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif. Tergantung variabel yang diuji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

H₂ : *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

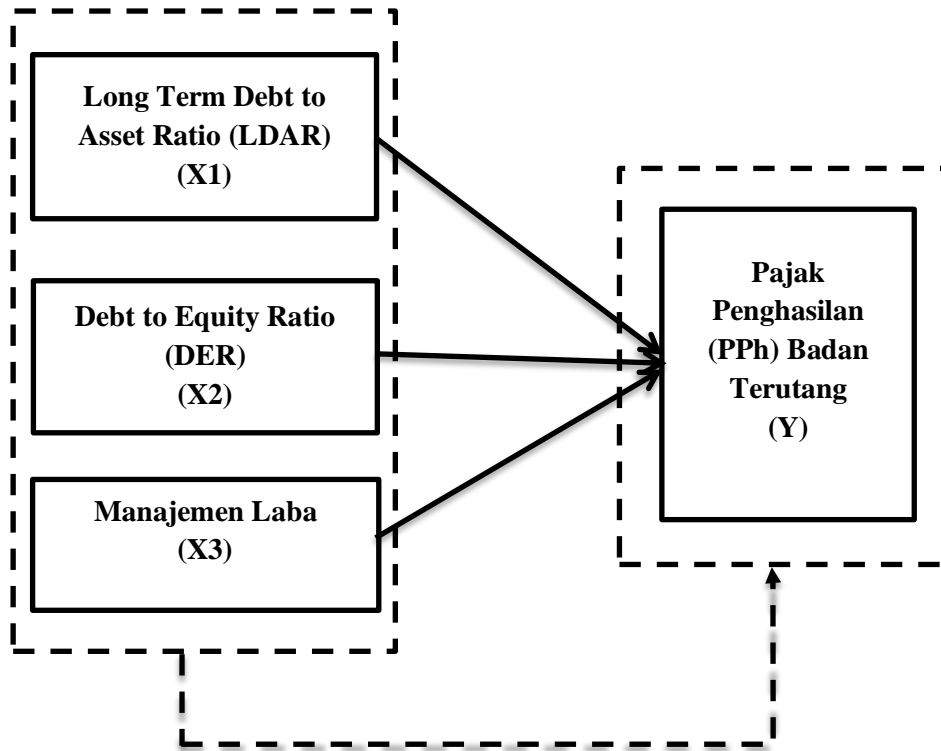
H₃ : Manajemen Laba berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

H₄ : *Long Term Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan Manajemen Laba secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh, maka kerangka konseptual penelitian dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat gambar 2.1. sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

—————> :Secara Parsial

- - - - -> :Secara Simultan